

## DAFTAR PUSTAKA

### a. Buku

1. Appeldorn, L. J. van. 1986. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.
2. Arief, B. N. 1992. *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.  
-----, 1999. *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum, Sebuah Penelitian Tentang Fondasi Kefilsafatan Dan Sifat Keilmuan Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
3. Asshiddiqie, Jimly. 2011. *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
4. Austin, John. 1998. *The Province of Jurisprudence Determined Edited by David Campbell and Philip Thomas*. London: Routledge Taylor & Francis Group.
5. Fajar, Mukti ND dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
6. Heywood, Andrew. 2014. *Politik, Alih Bahasa oleh Ahmad Lintang Lazuardi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
7. Kusriyah, Sri. 2019. *Politik Hukum Desentralisasi & Otonomi Daerah Dalam Perspektif Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Semarang: UNISSULA PRESS.
8. Mertokusumo, Sudikno. 2012. *Teori Hukum*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
9. Mahfud, MD Moh. 2019. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press: Jakarta.

10. Meuwissen, 2007. Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum Dan Filsafat Hukum, Terjemahan B. Arief Sidharta. Bandung: Refika Aditama.
11. Peursen, Van. CA. 1990. Susunan Ilmu Pengetahuan: Sebuah Pengantar Filsafat Ilmu. Diterjemahkan oleh J. Dros. Jakarta: PT Gramedia.
12. Prasetyo, Teguh dan Abdul Halim Barkatullah. 2011. Ilmu Hukum & Filsafat Hukum. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
13. Rahardjo, S. (2012). Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya.
14. Ritzer, George dan Douglas J. Goodman. 2009. Teori Sosiologi, Dari Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Post Modern. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
15. Rumadi, dan Marzuki. 2001. Fiqh Mazhab Negara, Kritik Atas Politik Hukum di Indonesia. Yogyakarta: LKiS.
16. Soehino. 2010. Politik Hukum Indonesia, Cetakan Pertama. Yogyakarta: BPFE.
17. Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2013. Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
18. Soemitro, R. H. 1990. Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri. Jakarta: Ghalia Indonesia.
19. Utrecht, E. 1983. Pengantar Dalam Hukum Indonesia. Jakarta: PT Ikhtiar Baru Bekerja sama dengan Sinar Harapan.
20. Waluyo, B. 1991. Penelitian Hukum dan Praktek. Jakarta: Sinar Grafika.

#### **b. Peraturan Perundang-undangan**

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 memperbaharui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Jabatan PPAT.
6. Klasifikasi Buku Lapangan Kerja Indonesia Nomor 969104 tentang Aktivitas Notaris Dan PPAT.

**c. Al-Qur'an (ditaruh diatas sendiri)**

1. Q.S. Quraaisy ayat 3-4.
2. Q.S. An-Nisa ayat 9.
3. Q.S. Ath-Thalaq ayat 2-3.

**d. Jurnal dan Penerbitan Lainnya**

1. Astrid Arsyana Dewi, Perubahan Paradigma Pengelolaan Negara dari Konsep Negara Penjaga Malam Menuju Negara Kesejahteraan dan Pengaruhnya Terhadap Eksistensi Pengadilan Tata Usaha di Indonesia, dalam [https:// server2.docfoc.com/](https://server2.docfoc.com/), diakses Kamis, tanggal 07 April 2016.
2. Bobby Savero mengutip Mark Lutz: Economics can no longer be seen as the theory of maximum possible production with consequent effects on welfare, but rather, in the opposite manner, as the theory of maximum possible welfare with consequent effects on production. Bobby Savero, Ekonomi Indonesia Antara Tionghoa dan Kaum Proletar, dalam <http://bobbysavero.blogspot.com/2008/05/ekonomi-indonesia-antara-tionghoa-dan.html>, diakses Kamis, tanggal 26 November 2020.
3. Firdaus, Rais. 2020. Weakness Of Political Law Notice Not Reflecting Justice For Notary. *Jurnal Akta*, Vol. 7, No. 1, Maret 2020.

4. Handoko, Widhi. 2011. Rekonstruksi Sistem Birokrasi Pertanahan Menuju Konsep Keadilan dalam Kerangka Politik Hukum Agraria: Tinjauan Terhadap Implementasi Ketetapan MPR RI No. IX/MPR/2001. *Jurnal Konstitusi*, Vol. 4, No. 2, November 2011.
5. Ristyawati, A. 2017. Analisis Hukum Mengenai Legal Standing Pemohon Dalam Perkara Pembubaran Partai Politik Di Indonesia Sebagai Wujud Negara Demokratis. Thesis UNDIP.
6. Sodiq, Amirus. 2015. Konsep Kesejahteraan Dalam Islam. *Equilibrium*, Jilid 3, No. 2, Desember 2015.
7. Tim Pedoman Penulisan Tesis Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung. 2018. Buku Pedoman Penulisan Tesis Program Magister (S-2) Kenotariatan (M.Kn) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung. Semarang: Universitas Islam Sultan Agung.

